

**PENGUNAAN JASA PERUSAHAAN MILITER
DAN KEAMANAN SWASTA (*PRIVATE MILITARY
AND SECURITY COMPANY*) DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL¹**

Oleh: Miguel J. P. Abulhajat²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan atau regulasi Penggunaan jasa PMSC dan bagaimana pertanggung jawaban dari pihak-pihak pengguna jasa PMSC. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. PMSC atau *Private Military & Security Company* memiliki peran besar dalam daerah-daerah konflik zaman moderen ini. Walaupun membedakan diri dengan *mercenary* pada umumnya dan dalam hukum humaniter unsur-unsurnya tidak memenuhi definisi sebagai tentara bayaran dapat dikatakan bahwa PMSC adalah tentara bayaran moderen oleh karena tujuan perusahaan tersebut yaitu keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini memiliki staf dan personil yang mencapai jumlah ratusan ribu dan dapat beroperasi dimanapun di seluruh dunia. Dengan keahlian atau pelatihan yang dimiliki oleh personil PMSC dapat menimbulkan bahaya tanpa ada pengawasan dan hukum yang mengaturnya. Layanan jasa yang disediakan PMSC bervariasi mulai dari pelatihan militer dan keamanan, penyediaan logistik, penyediaan peralatan militer, konvoi, pengangkutan, penjagaan tanpa senjata dan dengan bersenjata serta lainnya. 2. Pertanggung jawaban dari pihak-pihak pengguna jasa PMSC disesuaikan dengan isi kontrak dengan perusahaan PMSC termasuk kedudukan pihak pengguna jasa dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan isi ICoC yang ditandatangani PMSC serta hukum nasional yang berlaku di *Territorial state*, *Contracting State*, dan *Home State*. Dengan mayoritas personil PMSC adalah veteran dan memiliki pelatihan militer, tanpa adanya hukum yang mengatur dan mengikat dapat menyebabkan terjadinya *Chaos*. Tanpa adanya

aturan bisnis ini dapat berkembang ke arah yang salah karena siapapun yang beruang dapat menyewakan jasa perusahaan ini dan mendapatkan tentara pribadi (*private army*).

Kata kunci: Penggunaan Jasa, Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata dan peperangan sudah ada sejak awal perkembangan peradaban manusia. Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa³ "*Human life was Solitary, Poor, Nasty, Brutish, and Short*" artinya manusia pada dasarnya adalah makhluk hidup yang kasar, cinta kekerasan dan dalam keadaan pikiran yang primitif dimana dorongan alamiahlah yang mengatur keseharian manusia, jadi sejak awal manusia sudah sering melakukan perkelahian dan tidak terhindar dari konflik. Jadi dapat disimpulkan bahwa agresi adalah sifat dasar manusia.

Adanya hukum-hukum internasional maupun nasional yang mulai menutup dan mempersulit penggunaan jasa tentara bayaran konvensional, maka mulai bermunculan suatu jenis tentara bayaran baru di akhir abad-20 yaitu *Private Military and Security Company* atau Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta⁴ (selanjutnya disebut PMSC). PMSC sebenarnya adalah organisasi tentara bayaran yang berbentuk Perusahaan yang menjual jasa perlindungan, pelatihan sampai pada persediaan peralatan militer.

Perusahaan swasta ini beranggotakan ex-militer atau veteran-veteran perang yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan militernya sebagai jasa yang bisa disewakan secara profesional, *Executive Outcomes* (EO)

³Thomas Hobbes, *Leviathan*, London, 1651, "Chapter XIII.: Of the Natural Condition of Mankind As Concerning Their Felicity, and Misery" hlm. 78. Menjelaskan sifat manusia secara alamiah dalam keadaan perang atau kacau dan keadaan tanpa keteraturan, satu manusia adalah musuh bagi manusia lain. Dalam keadaan seperti ini tidak ada kesempatan untuk perkembangan yang signifikan.

⁴ Penulis menggunakan istilah PMSC karena walaupun terdapat banyak istilah lain seperti PMC (Private Military Company), PSC (Private Security Company), PMF (Private Military Firm), semuanya merujuk pada hal yang sama dan istilah yang paling cocok untuk mewakili seluruh istilah itu secara umum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy Sumakul, S.H, M.H; Dr. Natalia Lengkong, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101480

adalah salah satu contohnya. PMSC yang didirikan pada tahun 1989 oleh Eeben Barlow, seorang mantan perwira di *South African Defence Force* (SADF) dan perusahaan ini beranggotakan hampir seluruhnya mantan prajurit SADF.⁵

PMSC mendapatkan keuntungan di daerah-daerah yang sedang dalam keadaan abu-abu atau vakum kekuasaan oleh karena perang atau konflik bersenjata yang berkepanjangan, dimana pihak-pihak seperti Negara (*State*), Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation*), dan Organisasi-organisasi Internasional (*International Organizations*) dapat menggunakan jasa-jasa yang ditawarkannya. Perusahaan ini juga terus berusaha untuk mengubah perspektif orang mengenai label atau citra '*mercenary*'nya dengan melakukan *branding* dan strategi-strategi humas. Mengidentifikasi dirinya sebagai Perusahaan Jasa Keamanan (*Private Security Provider/PSPs*) agar memberikan suatu kesan netral dan positif di mata masyarakat.⁶

Yang sering terjadi di lapangan adalah banyak pelanggaran terhadap HAM dan Hukum Humaniter. PMSC dapat terhindar dari masalah hukum, dikarenakan status hukum yang masih tidak jelas dan banyak negara belum memiliki hukum nasional yang mengatur tentang perusahaan-perusahaan ini. Dalam beberapa kasus yang terjadi adalah PMSC yang bertugas di lapangan mendapatkan hak imunitas yang diberikan oleh kliennya, seperti yang terjadi di Irak, Proconsul Amerika Paul Bremer melindungi PMSC dari tuntutan hukum dengan mengeluarkan surat perintah No. 17 (*Coalition Provisional Authority No.17 of 2004*).⁷ Hal ini membuat banyak cela untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lapangan, walaupun staf atau anggota PMSC adalah mantan prajurit tetapi tujuan mereka sekarang adalah untuk mendapatkan uang atau laba dan bukan lagi tujuan yang lebih mulia yaitu

berjuang untuk bangsa dan negara, sehingga tidak menutup kemungkinan anggota-anggota tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam bertugas.

Penggunaan PMSC bervariasi dari jenis kliennya, Negara (*state*) sebagai salah satu pihak yang sering menggunakan jasa PMSC, menyewanya untuk mendampingi tentara nasional negara tersebut dan membantu dalam hal logistik maupun misi-misi khusus yang dirahasiakan, Perusahaan Multinasional menggunakan jasa PMSC untuk menjadi petugas keamanan swasta (*private security*) melindungi aset-aset perusahaan tersebut seperti, pabrik, kilang minyak, tambang dan lain-lain, organisasi-organisasi internasional juga menggunakan jasa PMSC sebagai petugas keamanan yang mendampingi agen maupun staf lapangan organisasi tersebut seperti agen humaniter yang sering turun ke zona konflik. Akan tetapi karena ketidakjelasan dalam status hukum anggota PMSC dapat menjadi ancaman besar, karena PMSC dapat beroperasi secara semena-mena dalam keadaan yang kabur. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

Anggota PMSC tidak dapat di kategorikan sebagai *Civilians*, karena mereka sering menggunakan senjata, membawa peralatan militer dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki fungsi militer.

*"However, these individuals cannot be considered as civilians, given that they often carry and use weapons, interrogate prisoners, load bombs, drive military trucks and fulfill other essential military functions. Those who are armed can easily switch from a passive/defensive to an active/offensive role and can commit human rights violations and even destabilize governments. They cannot be considered soldiers or supporting militias under international humanitarian law either, since they are not part of the army or in the chain of command, and often belong to a large number of different nationalities."*⁸

⁵ Peter Singer, *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*, Cornell University Press, 2008, hlm.102.

⁶ Lou Pingeot, Report, "Dangerous Partnership : Private Military & Security Companies and the UN" Global Policy Forum, hlm. 14.

⁷ Iraq: Coalition Provisional Authority No.17 of 2004 (Revised), [www.refworld.org>docid.](http://www.refworld.org/docid/) Diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.

⁸ Article, *The Privatization of War : Mercenaries, Private Military and Security Companies (PMSC)* by, www.Globalresearch.ca. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.

Dan Anggota PMSC juga tidak dapat sepenuhnya di kategorikan sebagai seorang tentara bayaran atau mercenary, karena PMSC tidak memenuhi seluruh unsur-unsur yang tertera dalam definisi yang ada pada konvensi internasional mengenai mercenary.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penggunaan Jasa Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Company) Dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Internasional.”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan atau regulasi Penggunaan jasa PMSC?
2. Bagaimana pertanggung jawaban dari pihak-pihak pengguna jasa PMSC?

C. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau dinamakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya yaitu data yang sudah ada dan bukan data langsung. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis mengambil bahan-bahan referensi dari perpustakaan sebagai sumber penelitian. Bahan-bahan rujukan tersebut diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan serta menterjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan ketentuan hukum Internasional yang mengatur tentang penggunaan jasa PMSC.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penggunaan Jasa Perusahaan Keamanan Militer Swasta.

Pengaturan dalam penggunaan jasa tentara bayaran (*mercenary*) telah diatur dalam hukum humaniter internasional, antara lain dalam konvensi Jenewa (1949), dan Protokol tambahan (1977), Konvensi Internasional

menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran (1989), dan hukum Internasional regional yang berlaku di Afrika oleh OAU (*Organization of African Unity*) yaitu *Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* yang dilakukan pada tanggal 3 juli 1977 dan berlaku 22 april 1985.

Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran (1989), berevolusi dari pendahulunya yaitu konvensi jenewa (1949) dan Protokol Tambahan pasal 47 (1977), dapat dilihat dalam penambahan penggunaan unsur definisi *“armed conflict”* yang diletakan pada Pasal 1, paragraf 1, dan juga unsur *“any other Situations”* (Pasal 1, para 2)⁹. Dalam hakikatnya, konvensi ini menentang segala bentuk penggunaan tentara bayaran, dalam Pasal 2 yang berbunyi :¹⁰

Setiap orang yang merekrut, menggunakan, membiayai atau melatih tentara bayaran, sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 dari Konvensi, melakukan suatu pelanggaran terhadap tujuan Konvensi.

Dengan adanya konvensi-konvensi diatas masyarakat internasional menentang adanya penggunaan *mercenary*. Namun dengan perkembangan munculnya PMSC, membuat kekosongan dan keburaman dalam penggunaan jasanya. Dikarenakan PMSC tidak memenuhi unsur-unsur definisi *mercenary* yang telah tertera di konvensi-konvensi tersebut, walaupun sebenarnya PMSC adalah *mercenary* moderen yang memiliki motivasi mencari keuntungan namun tersamarkan dalam bentuk badan usahanya.

B. Pertanggung Jawaban Pihak-Pihak Pengguna Jasa ‘PMSC’.

PMSC di zaman ini dapat dikatakan menjadi salah satu bisnis yang berkembang sangat pesat, dengan beberapa perusahaan PMSC memiliki pegawai yang berjumlah sebanyak puluhan sampai ratusan ribu di seluruh dunia dan memiliki omset pendapatan yang dapat dikatakan sangat banyak. G4S memiliki ratusan

⁹ Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran (1989), Pasal 1.

¹⁰ Ibid, pasal 2.

ribu pegawai di seluruh dunia dengan omset jutaan dollar per tahun¹¹, sejumlah PMSC lainnya asal Inggris juga memperoleh keuntungan yang sangat besar.¹² Faktor utama perkembangan bisnis PMSC yang begitu cepat adalah karena ada begitu banyak pihak-pihak (*clients*) yang terus menerus menggunakan jasanya.

Jasa-jasa yang ditawarkan sangatlah banyak dari hal-hal yang merupakan bidang keamanan saja yaitu, pengawalan pengiriman uang, pengamanan menggunakan senjata maupun tidak, pelatihan keamanan, penaksiran resiko, pengintaian, pengumpulan data intel, dan lain – lain. Sampai ke bidang layanan jasa yang bersifat militer yaitu, pelatihan personil militer, penyaluran logistik dan pemeliharaan peralatan militer, penyediaan : pesawat, angkutan bersenjata , dan peralatan militer lainnya, interogasi, perlindungan konvoi, bahkan operasi-operasi rahasia tertentu.¹³ Salah satu faktor pendorong dalam bisnis ini adalah kemudahan dari pihak PMSC untuk menyesuaikan pilihan layanan jasa yang dapat diberikannya sesuai dengan kebutuhan *clients*.

Pihak-pihak pengguna jasa bervariasi, sesuai jasa yang diperlukan. Negara menggunakan jasa PMSC dengan tujuan militer maupun non-militer. Organisasi-organisasi internasional yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah yang menggunakannya dalam misi-misi sosial dan pengamanan. Dan perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan jasanya untuk keamanan di lokasi-lokasi tertentu yang menjadi aset perusahaan. Biasanya PMSC tidak

menyewakan jasanya bagi masyarakat umum agar dapat tetap *low profile* dan melakukan pencitraan serta menghindari dari tekanan public.

Penulis membagi 3 jenis *clients* pengguna jasa PMSC, Negara (*states*), Organisasi Internasional (*International Organization*), dan Perusahaan lain (*other Companies*).

1. Negara (*states*)

Negara dapat dikategorikan menjadi pihak yang paling sering menggunakan jasa PMSC dan merupakan pihak yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perkembangan bisnis tersebut. Seperti yang telah di jelaskan di atas dalam *the Montreux Document*, kategori negara dibagi menjadi 3 bagian yaitu, *Contracting States*, *Territorial States*, dan *Home States*. Dalam pembahasan ini akan lebih membahas tentang *Contracting States* dan *Home States*. Tidak sedikit negara yang masuk dalam kategori *home states* yang juga merupakan *contracting states*. Dikarenakan *home states* adalah negara yang merupakan basis tempat PMSC bermarkas atau negara dimana perusahaan PMSC tersebut terdaftar. Maka dengan izin berbisnis yang diberikan negara terhadap PMSC, memberikan asumsi bahwa negara juga memiliki kepentingan PMSC tersebut dan berkemungkinan besar menjadi calon *Client* dikemudian hari. Negara memegang peran penting dalam keberlangsungan suatu PMSC karena izin berbisnis di tetapkan sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara, hal ini membuat adanya suatu hubungan dekat antara negara dan PMSC. Bahkan dilaporkan bahwa penggunaan jasa oleh negara menyumbangkan sepertiga dari keseluruhan pendapatan PMSC.¹⁴ Contoh negara yang merupakan *contracting state* sekaligus *home state* adalah Amerika Serikat dan Inggris, keduanya adalah *clients* terbesar bagi PMSC yang berbasis di negaranya sendiri maupun di negara lain. Amerika Serikat dan Inggris merupakan contoh negara yang sudah memiliki regulasi nasional spesifik tentang PMSC. Amerika dan Inggris memiliki peraturan-peraturan tersebut

¹¹ Lou Pigeot, *Dangerous Partnership, Private military & Security Company and the UN*. Global policy Forum, New York 2012, hlm.11.

G4S memiliki sekitar 640,000 jumlah pegawai menghasilkan pendapatan sebesar \$25,000,000,000, Stockholm-based securities memiliki 300,000 pegawai menghasilkan omset \$9,000,000,000 per tahun.

¹² War on Want by Fabien Mathieu & Nick Dearden, *Corporate Mercenaries : the treat of private military and security companies*, magazine, war on want, London, 2006, hlm. 4.

PMSC asal Inggris yang dipergunakan di Irak dari tahun 2003-2004 memiliki omset sekitar £320,000-£1,800,000,000, Aegis memperoleh keuntungan dari £554,000 - £62,000,000 per tahun 2003-2005, ArmorGroup memperoleh keuntungan dari sektor keamanan saja sekitar \$900,000,000 sampai \$1,700,000,000.

¹³ Op.cit, Lou Pigeot, hlm. 12-13.

¹⁴ Ibid, Lue Pigeot, hlm 13, wawancara dengan Doug Brooks yang merupakan perwakilan dari ISOA, 15 Maret 2012.

dikarenakan kedua negara ini adalah *Home State* sekaligus *Contracting State* terbesar di dunia. Negara-negara lain juga telah mengembangkan berbagai bentuk peraturan-peraturan mengenai PMSC¹⁵

2. Organisasi Internasional (IOs)

Negara bukan satu-satunya jenis *client* yang menggunakan jasa PMSC, *client* lain yang cukup sering menggunakan jasa perusahaan tersebut adalah organisasi internasional. Selama beberapa tahun terakhir penggunaan jasa PMSC oleh organisasi-organisasi internasional telah meningkat. Dari organisasi pemerintah (IGO) sampai ke organisasi social (NGO), sama-sama menggunakan jasa perusahaan ini. Layanan jasa yang biasa digunakan mulai dari yang bersifat perlindungan tak bersenjata (*unarmed protection*) sampai perlindungan dengan bersenjata (*armed protection*).

3. Perusahaan Internasional (*Multinational Corporations/MNCs*)

Perusahaan Internasional (selanjutnya disebut MNC) merupakan klien penting bagi PMSC. hampir semua MNC di seluruh dunia menggunakan jasa PMSC pada bidang-bidang tertentu. Biasanya jasa PMSC digunakan pada cabang maupun aset MNC tersebut di negara-negara berkembang atau negara yang memiliki institusi yang lemah. MNC menggunakan personil PMSC untuk berbagai bentuk layanan jasa seperti, petugas keamanan tak bersenjata untuk menjaga aset perusahaan dan melakukan patrol, konsultan keamanan, petugas keamanan bersenjata untuk melindungi aset di zona konflik, konvoi, dan melindungi VIP, menjaga pabrik, tambang, bank dan fasilitas lainnya.¹⁶

MNC yang paling sering menggunakan personil PMSC bersenjata adalah perusahaan bersifat ekstraktif yang berbisnis di sektor tambang, minyak dan gas. Dikarenakan MNC dalam sektor ini memiliki instalasi, kilang maupun aset lainnya di negara-negara

berkembang yang memiliki sumber daya alam berlimpah, dan kebanyakan konflik terjadi di negara-negara berkembang tersebut. Terdapat beberapa MNC ekstraktif yang memiliki kasus-kasus kontroversi seputar pelanggaran ham oleh petugas atau personil PMSC yang disewanya. Tidak hanya MNC ekstraktif yang memiliki kasus kontroversi seputar petugas keamanannya melainkan MNC yang berbisnis di sektor agrikultur dan makanan.¹⁷ Kurangnya data tentang kekerasan yang dilakukan oleh petugas keamanan sewaan pertahun ini yang mempersulit untuk mengukur tingkat permasalahan yang terjadi jika MNC menggunakan jasa PMSC sebagai petugas keamanannya.

Salah satu alasan mengapa MNC memilih untuk menyewa petugas keamanan dari PMSC dan tidak menggunakan stafnya sendiri untuk menjadi petugas keamanan adalah keamanan bukanlah bidang yang dikuasai perusahaan tersebut dan MNC membutuhkan tenaga keamanan yang professional. Alasan lainnya mengapa MNC tidak mengerjakan keamanannya sendiri karena lebih murah dan menguntungkan untuk menyewa jasa keamanan yang professional dibandingkan mengelolanya sendiri. Dengan mengkontrak PMSC juga menguntungkan dari sisi pencitraan karena jika terjadi suatu masalah yang murni hanya dilakukan oleh personil PMSC, MNC dapat langsung memutuskan kontrak dan menjaga *image*-nya dimata publik.

MNC juga menggunakan tenaga keamanan domestik, berkerja sama dengan kepolisian maupun angkatan bersenjata negara dimana aset perusahaan itu berada. Hal ini dilakukan untuk tujuan pencitraan pula, agar mendapat simpati dan kepercayaan dari public atau masyarakat sekitar. Tetapi di negara berkembang, zona konflik, atau negara dengan institusi yang lemah jarang terjadi kerja sama ini. Dikarenakan biasanya di daerah dengan keadaan negara seperti itu, memiliki polisi atau tentara yang terbilang korup dan lemah, hal ini dapat membawa lebih banyak masalah daripada keuntungan.

PENUTUP

¹⁵ Op.cit , University of Denver website, Private Security Monitor, Global data & statistics, Statistics on the Private Security Industry, National Regulations. (Lihat Lampiran III).

¹⁶ Elizabeth Ulmas, *Small Arms Survey 2011: Chapter 5. Protected but Exposed: Multinationals and Private Security*, Cambridge University Press, New York, 2011, hlm.137.

¹⁷ Ibid, hlm. 139.

A. Kesimpulan.

1. PMSC atau *Private Military & Security Company* memiliki peran besar dalam daerah-daerah konflik zaman moderen ini. Walaupun membedakan diri dengan *mercenary* pada umumnya dan dalam hukum humaniter unsur-unsurnya tidak memenuhi definisi sebagai tentara bayaran dapat dikatakan bahwa PMSC adalah tentara bayaran moderen oleh karena tujuan perusahaan tersebut yaitu keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini memiliki staf dan personil yang mencapai jumlah ratusan ribu dan dapat beroperasi dimanapun di seluruh dunia. Dengan keahlian atau pelatihan yang dimiliki oleh personil PMSC dapat menimbulkan bahaya tanpa ada pengawasan dan hukum yang mengaturnya. Layanan jasa yang disediakan PMSC bervariasi mulai dari pelatihan militer dan keamanan, penyediaan logistik, penyediaan peralatan militer, konvoi, pengangkutan, penjagaan tanpa senjata dan dengan bersenjata serta lainnya.
2. Pertanggung jawaban dari pihak-pihak pengguna jasa PMSC disesuaikan dengan isi kontrak dengan perusahaan PMSC termasuk kedudukan pihak pengguna jasa dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan isi ICoC yang ditandatangani PMSC serta hukum nasional yang berlaku di *Territorial state, Contracting State, dan Home State*. Dengan mayoritas personil PMSC adalah veteran dan memiliki pelatihan militer, tanpa adanya hukum yang mengatur dan mengikat dapat menyebabkan terjadinya *Chaos*. Tanpa adanya aturan bisnis ini dapat berkembang ke arah yang salah karena siapapun yang beruang dapat menyewakan jasa perusahaan ini dan mendapatkan tentara pribadi (*private army*).

B. Saran.

Dalam penggunaan jasanya, PMSC seringkali dapat terhindar dari tuntutan hukum maupun masalah menyangkut pelanggaran humaniter dan ham yang dilakukan staf maupun personilnya. Disebabkan oleh beberapa hal

seperti, *Contracting, Territorial, atau Home States* belum memiliki hukum nasional untuk menangani kasus tersebut, atau *Home States* melindungi PMSC yang terdaftar di negaranya, atau walaupun izinnya dicabut PMSC tersebut dapat pindah ke negara lain dan mendaftarkan diri dinegara tersebut.

Saran saya untuk mencegah pelanggaran humaniter dan ham yang sering terjadidalam penggunaan jasa PMSC adalah penerapan sistem "*Three Layered Protection System*". Sistem perlindungan berlapis tiga ini adalah agar memperkecil dan mempersulit kemungkinan PMSC lari atau terhindar dari penegakan hukum. Lapisan pertama adalah untuk adanya suatu hukum internasional, sudah terdapat beberapa inisiatif internasional seperti *the Montreux Document* untuk membantu pihak-pihak pengguna jasa PMSC membuat hukum atau regulasi seputar PMSC, dan *International Code of Conduct (ICoC)* untuk mengatur kode etiknya. Lebih baik lagi jika *The Draft of a possible Convention on Private Military and Security Companies* terealisasi dan ditandatangani oleh negara-negara didunia. Lapisan kedua adalah hukum atau regulasi tingkat regional, dimana negara-negara di kawasan tertentu dapat membuat suatu regulasi dengan dasar budaya dan kebiasaan yang sama dimana negara-negara tersebut dapat saling mendukung untuk menjaga nilai-nilai humaniter dan ham dalam penggunaan jasa PMSC dan memperkecil kemungkinan PMSC untuk secara mudah pindah dan mendaftarkan diri di negara lain sekitar kawasan tersebut. Dan lapisan terakhir adalah hukum nasional, hukum nasional terkait PMSC telah lama didorong dalam *the Montreux Document* agar supaya negara tersebut dapat bertindak secara langsung jika terjadi pelanggaran humaniter maupun ham dalam penggunaan jasa PMSC.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Goldsworthy, *In The Name Of Rome*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2004.
- Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2004, PL : Bilangan 26:2.
- Anthony Mockler, *the Mercenaries*, NY: Macmilan, New York, 1969.

- Carl Von Clausewitz, *On War*, Oxford University Press, New York, 2007.
- Carlos Ortiz, *Private Armed Forces and Global Security: A Guide to the Issues*, Oxford: Praeger, Santa Barbara, Denver, 2010.
- David J. Bederman, *The Spirit of International Law*, Athen London. The University of George Press, 2002.
- Declaration of the Rights of Man, 26 August 1789 (France), Article 3.
- Department of Defence, *Defence Acquisitions Regulations System (DFARS)*, 2009 dikutip dari: Elke & Cornelius. Annually Report, by Amnesty International USA, 2006.
- Elizabeth Ulmas, *Small Arms Survey 2011: Chapter 5. Protected but Exposed: Multinationals and Private Security*, Cambridge University Press, New York.
- Érika Louise Bastos Calazans, *Regulating the Business Activities of private Military and Security Companies Under International Law*, Abstrak, Ph.D in International Law, Kobe University, Graduate School of Law, Division of Academic Legal Studies (2012) with the Japanese Government "Monbukagakusho" Scholarship (2007-2012); International Public Law researcher, Hokkaido University (2008); L.L.M in International Law, Pontifical Catholic University of Minas Gerais (2007); Bachelor of laws, FUMEC University (2005).
- Erkki Holmila, *The History of Private Violence*, ENDC Proceedings, Volume 15, 2012.
- Fisheries Jurisdiction (Merits) Case (1974) ICJ Reports, hal 3 dan North Sea Continental Shelf Cases (1969) ICJ Report.
- Francisco De Vitoria, *De Bello*, Artikel I, Para 8. Dikutip dari L. C. Green. *Status of Mercenaries in International Law*. H L. C. Green. Essays on the Modern Law of War. Dobbs Ferry, NY: Transnational, 1985.
- Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo*, Algora Publishing, New York, 2004.
- ICJ Reports, 1985 hlm. 13,29;81 ILR, hlm.239. Diversion of Water from the Meuse Case (1937) PCIJ Reports, Series A/B, no 70; Temple of Preah Vihear Case (Merits) (1962) ICJ Reports, dan the Corfu Channel Case (Merits) (1949) ICJ Reports
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?*, Opinion Paper, March 2008.
- International Code of Conduct Association (ICoCA)
- Janice E. Thomson. *Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
- John Temple-Leader & Giuseppe Marcotti. Ser John Hawkwood : A Story of a Condottiere, Leader Scott, translate, London, 1889.
- John O" Brien, *International Law*, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Juan Carlos Zarate, *The Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, International Law, and the New World Disorder*, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University Stanford Journal of International Law, 1998.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2008.
- Kathryn Bolkovac, *The Whistleblower: sex Trafficking, Military Contractors, and One Woman's Fight for Justice* (New York: Palgrave MacMillan, 2011).
- Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran (1989), Konvensi Hukum perjanjian Internasional Wina, 1969.
- Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I dan II tahun 1977.

- Lou Pigeot, *Dangerous Partnership, Private military & Security Company and the UN*. Global policy Forum, New York 2012.
- Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Montreux +5 Conference, Chairs' Conclusions, Geneva 13 December 2013, *need for the implementation of the montreux document*.
- Peter W. Singer, *Corporate Warriors : Rise of the Privatized Military Industry*, NY: Cornell University Press, Ithaca, 2003.
- Robert Ardrey, *African Genesis: A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man*, Atheneum, New York, 1961
- Robert Verlic, Cpt, Slovene Armed Forces, *From Citizen Militia to Professional Military: Transformation of the Roman Army*, A thesis Presented to the Faculty of the U.S Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 2007.
- Schwartz, *the Department of Defence's Use of Private Security Contractors in Iraq and Afghanistan*, p.17. dikutip dari, Elke Krahmann & Cornelius Friesendorf, Directorate-General for External Policies of the Union, Directorate B, Policy Department, Study : *"The role of Private Security Companies (PSCs) in CSDP Missions and Operations*, 2011.
- Rosemann Nils, 'Code of Conduct: tool for self-regulation for Private Military and Security Companies' (2008) 15 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Occasional Paper.
- Statuta Mahkamah Internasional (ICJ).
- St. Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, Benziger Bros. edition, 1947, Translated by Fathers of the English Dominican Province, Second part of the second part, Qst. 40, of War, file digital oleh: Sandra K.Perry Perrysburg, Ohio.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- The Montreux Document.
- The OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 1977.
- Thomas Hobbes, *Leviathan*, London, 1651,"Chapter XIII.: Of the Natural Condition of Mankind As Concerning Their Felicity, and Misery"
- Tracts Relating to Ireland, Printed for the Irish Archaeological Society. Vol. II*, Irish Archaeological Society, Dublin, 1843.
- United Nations Mercenary Convention, 4 Desember 1989
- V.G. Kiernan, *Foreign Mercenaries and Absolute Monarchy, Past and Present*, 1957, Vol. 11,
- Walter Miller Cicero, *De Officiis*. With an English Translation by Walter Miller, Woods and Sons, 1928, London.
- War on Want by Fabien Mathieu & Nick Dearden, *Corporate Mercenaries : the treat of private military and security companies*, magazine, war on want, London, 2006,
- Website :
- CNN Library, *Irak Prison Abuse Scandal Fast Facts*,
<<http://edition.cnn.com/2013/10/30/world/meast/iraq-prison-abuse-scandal-fast-facts/>>.
- Global Policy Forum, *The Privatization of War: Mercenaries, Private Military and Security Companies (PMSC)*.
<<http://www.globalresearch.ca/the-privatization-of-war-mercenaries-private-military-and-security-companies-pmsc/21826>>
- Hans Kelsen, *man is a social and political being* seperti yang dikemukakan Choirul Umam, *Proses-Proses Interaksi Sosial*,
<http://choirul.umam.staff.gunadarma.ac.id>.
- Iraq: Coalition Provisional Authority No.17 of 2004 (Revised),
www.refworld.org/docid/
- ISOA Principles of conduct is currently dalam versi ke-12, February 11, 2009.
< <http://www.stability-operations.org/> >.

- Niccolo Machiavelli. 1532. *The Prince*. H W.K. Marriot transl.
<www.gutenberg.org/files/1232/1232-h/1232-h.htm>.
- Nicky Woolf, *Former Blackwater guards sentenced for massacre of unarmed Iraqi civilians*, The Guardian, Article, 14 April 2015.
<<https://www.theguardian.com/us-news/2015/apr/13/former-blackwater-guards-sentencing-baghdad-massacre>>
- The Privatization of War : Mercenaries, Private Military and Security Companies (PMSC) Article by, www.Globalresearch.ca.
- University of Denver, International Security and Diplomacy Private security monitor.
http://psm.du.edu/international_regulation/un_initiatives/human_rights_council_and_general_assembly/open_ended_working_group.html.
- Website Code of Conduct di tingkat negara, regional dan International :
- British Association of Private Security Companies Charter
<http://www.bapsc.org.uk/key_documentscharter.asp>.
- ASIAL Code of conduct
<<http://www.asial.com.au/Codeofconduct>>.
- CoESS/Uni-Europa, Code of conduct and Ethics for the Private Security Sector.
<<http://www.coess.org>>
- The Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR)
<http://www.state.gov/www/global/human_rights/001220_fsdr principles.html>.
- The Sarajevo Code of Conduct for Private Security Companies:
<<http://www.isn.ethz.ch/isn/DigitalLibrary/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=124863>> .
- Website Resmi beberapa PMSC :
- Dyncorp Code of ethics .
<<http://www.dyn-intl.com/code-of-ethics.aspx>>.
- Xe Company code of conduct.
<<http://www.xecompany.com>>.
- Control Risks website at